



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2011 – 2012
KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 20 – 21 NOVEMBER 2011**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2011**

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Setiap Reses Masa Persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011 - 2012, Komisi I DPR RI telah membentuk 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja, yaitu Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua. Dalam laporan ini akan disampaikan mengenai Laporan Tim Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kalimantan Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI khususnya permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, serta komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi mitra kerja Komisi I DPR RI dalam masa persidangan berikutnya.

C. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011, dengan komposisi keanggotaan Tim yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Anggota Komisi I DPR RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Staf Ahli Komisi I DPR RI dan 1 (satu) orang

Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI. Delegasi tim kunjungan kerja dipimpin oleh Mayjen TNI (purn) Tubagus Hasanuddin.

Adapun daftar nama Tim Kunker Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Tubagus Hasanuddin	PDIP	Ketua Tim
2.	Hayono Isman, SIP	PD	Anggota Tim
3.	Max Sopacua, SE., M.Si	PD	Anggota Tim
4.	Drs. Guntur Sasono, M.Si	PD	Anggota Tim
5.	Mayjen TNI (purn) Yahya Sacawirya, SIP. MM	PD	Anggota Tim
6.	Mirwan Amir	PD	Anggota Tim
7.	Dra. Lucy Kurniasari	PD	Anggota Tim
8.	Vena Melinda, SE	PD	Anggota Tim
9.	Drs. Enggartiasto Lukito	PG	Anggota Tim
10.	Ir. Fayakun Andriadi, M.Com	PG	Anggota Tim
11.	Drs. H.A. Muchammad Ruslan	PG	Anggota Tim
12.	Helmy Fauzi	PDIP	Anggota Tim
13.	Evita Nursanty, M.Sc	PDIP	Anggota Tim
14.	DR. M. Hidayat Nurwahid, MA	PKS	Anggota Tim
15.	Almuzammil Yusuf	PKS	Anggota Tim
16.	Mahfudz Abdurrahman	PKS	Anggota Tim
17.	Ir. H. Teguh Juwarno	PAN	Anggota Tim
18.	Ir. Muhammad Najib, M.Sc	PAN	Anggota Tim
19.	DR.H.Maiyasak Johan, SH.,MH	PPP	Anggota Tim
20.	DR. Effendy Choirie	PKB	Anggota Tim
21.	Rachel Maryam Sayidina	GERINDRA	Anggota Tim
22.	Agung Permata	Sekretariat Komisi I DPR RI Sekretariat Komisi I DPR RI Pemberitaan DPR RI Staf Ahli Komisi I DPR RI	
23.	Sugeng Riyadi		
24.	Iwan Armenias		
25.	Tubagus Erif Faturrahman		

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. GAMBARAN UMUM KONDISI KALIMANTAN SELATAN

Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km² atau 3.753.052 ha. Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi.

Berdasarkan statistik kependudukan tahun 2010, jumlah penduduk Kalimantan Selatan adalah 3.626.119 jiwa. Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2011 mencapai 1,92 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 4,64 persen. Jumlah penduduk bekerja di Kalimantan Selatan pada Agustus 2011 sebesar 1,82 juta orang, bertambah sebanyak 81,3 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 4,66 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan pada Agustus 2011 mencapai 5,23 persen. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan TPT Agustus 2010 yang sebesar 5,25 persen. Penyerapan terbesar penduduk yang bekerja di Kalimantan Selatan adalah di sektor pertanian (41,45 persen), sektor perdagangan (21,38) persen dan sektor jasa (15,03 persen). Sektor industri mampu menyerap sebesar 6,42 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Selatan. Pekerja yang berstatus buruh/karyawan sebesar 30,99 persen, sedangkan yang berstatus berusaha sendiri sebesar 19,77 persen. Penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar sebesar 20,07 persen dan berstatus bekerja dibantu oleh buruh tetap/buruh dibayar sebesar 3,22 persen.

Kota Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan wilayah yang memiliki TPT tertinggi di Kalimantan Selatan, sebesar 7,14 persen dan 6,69 persen. Kabupaten Balangan merupakan wilayah dengan TPT terendah, yaitu sebesar 2,32 persen.

B. KUNJUNGAN TERKAIT BIDANG TUGAS KOMISI I DPR RI

1. BIDANG PERTAHANAN

Terkait tugas Komisi I DPR RI di bidang pertahanan, tim kunker Komisi I DPR RI menerima paparan dan penjelasan dari mitra-mitra pertahanan yang berada di Kalimantan Selatan. Mitra tersebut adalah Korem 101/Antasari, Lanal Banjarmasin dan Lanud Syamsudin Noor. Selain mendengarkan paparan dari tiga kesatuan tersebut, tim juga berkesempatan meninjau langsung kondisi Rumah Sakit dan perumahan prajurit TNI di Banjarmasin.

a. Korem 101/Antasari

Korem 101/Antasari adalah Satuan Komando Kewilayahan yang berada di bawah jajaran Kodam VI/Mulawarman. Tugas pokoknya adalah melindungi mempertahankan kedaulatan NKRI yang berada di wilayah tanggungjawabnya yaitu Kalimantan Selatan. Korem 101/Antasari membawahi beberapa satuan yang tersebar di wilayah di Kalimantan Selatan:

- 1) 10 satuan setingkat Kodim
- 2) 10 kesatuan Balak Aju DAM VI/Mulawarman
- 3) 2 Kesatuan Satuan Tempur

Bila dilihat dari jumlah personel, seluruh personel di satuan komando tingkat wilayah jumlahnya hanya mencapai 54,8% dari TOP/DSSP. Sedangkan untuk kesatuan Balak Aju persentasenya lebih rendah yaitu 42,7% dari TOP/DSSP. Hanya satuan tempur saja yang jumlah personelnnya mendekati jumlah kebutuhan ideal yaitu 93,7% dari TOP/DSSP.

Kondisi Rumah Dinas yang berada di lingkungan Korem 101/Antasari kondisinya memperlihatkan bahkan sebagian sudah tidak lagi layak huni. Hal ini terjadi karena perumahan dinas tersebut dibangun rata-rata antara tahun 1960-1988. Program rehab pertahun yang diterima hanya 15 unit. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah Rumdis yang rusak berat yaitu 327 rumah. Disamping itu adanya para purnawirawan yang menggugat Korem 101/Antasari dan mengklaim perumahan dinas sebagai hak milik mereka. Pada saat tim Kunker Komisi I DPR RI meninjau langsung kondisi perumahan yang ada, lingkungan perumahan tersebut sangat memprihatinkan dan terkesan kumuh. Kondisi jalan tidak beraspal sehingga sangat becek dan rawan banjir ketika hujan, dan berdebu ketika panas. Mayoritas perumahan yang ada terbuat dari papan dan berbentuk panggung dengan lingkungan sekitar banyak ditumbuhi pepohonan atau semak. Sehingga ketika hujan, bukan hanya air yang masuk, tetapi juga binatang liar, khususnya binatang melata, dan juga beragam jenis serangga yang tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga dapat mengancam jiwa.

Selain kondisi perumahan dinas yang tidak layak, demikian juga dengan kondisi kendaraan bermotor. Kendaraan dinas yang nampak mewah hanyalah kendaraan Danrem tetapi warnanya tidak sesuai dengan warna kendaraan dinas militer (hijau). Ini karena kendaraan tersebut adalah milik Pemda dengan status pinjam. Kendaraan dinas Danrem kemudian digunakan oleh Kasrem. Sementara itu, para kepala satuan atau personel TNI hanya menggunakan kendaraan dinas, baik mobil atau motor, dengan kondisi apa adanya dan jauh dibawah standar kendaraan biasa. Perbaikan kendaraan dilakukan secara swadaya tanpa adanya bantuan dari pusat.

b. Lanal Banjarmasin

Lanal Banjarmasin adalah satuan pelaksana Lantamal VI yang bertugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur Koarmatim dan unsur-unsur Kotama Lakpus TNI AL lainnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Kondisi alutsista, peralatan persenjataan, kendaraan bermotor, alat komunikasi, baik secara kuantitas maupun kualitas secara umum masih kurang memadai apabila dihadapkan dengan luasnya wilayah operasional Sional Banjarmasin, mulai dari Kalsel sampai daerah Kalteng yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalbar.
- 2) Perumahan prajurit masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, mengingat kondisi bangunan banyak mengalami kerusakan.

c. Lanud Syamsudin Noor

Lanud Syamsudin Noor merupakan pangkalan operasi udara yang berada di kepulauan Kalimantan terletak di Provinsi Kalimantan Selatan di bawah jajaran Komando Operasi Angkatan Udara II (Koopsau II) Makassar.

Ancaman udara terhadap wilayah Kalimantan Selatan relatif kecil dikarenakan secara geografis letak Kalimantan Selatan relatif jauh dari perbatasan dan telah dikelilingi oleh beberapa Pangkalan Udara dan Satuan Radar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai arah, sebagai berikut :

- 1) Ancaman dari Arah Utara, pengamanan wilayah udara bagian Utara terpantau oleh Satuan Radar (Satrad) 223 di wilayah Lanud Balikpapan dan Satuan Radar (Satrad) 225 di wilayah Lanud Tarakan.
- 2) Ancaman dari Arah Barat, pengamanan wilayah udara bagian Barat terpantau oleh Lanud Supadio yang memiliki Skadron Udara 1.
- 3) Ancaman dari Arah Timur, pengamanan wilayah udara bagian Timur terpantau oleh Kosek Hanudnas II Makassar dan Lanud Hasanudin Makasar yang memiliki Skadron Udara 5.

- 4) Ancaman dari Arah Selatan, pengamanan wilayah udara bagian Selatan terpantau oleh Satuan Radar 221 Ngliyep dan Satuan Radar 222 Ploso. Terdapat pula Lanud Abd Saleh dengan yang memiliki Skadron Udara 4, 21 dan 32, demikian pula Lanud Iswahyudi dengan yang memiliki Skadron Udara 3, 14 dan 15.

Namun demikian, Lanud Syamsudin Noor ini juga tidak lepas dari permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi kesejahteraan prajurit TNI di lingkungan Lanud Samsudin Noor masih belum mencukupi atau belum sesuai dengan perkembangan biaya hidup yang ada.
- 2) Kurangnya personil di lingkungan Lanud Samsudin Noor, sehingga terdapat kekosongan jabatan pada tingkat-tingkat tertentu
- 3) Belum memiliki Ground Support Equipment, tangga pesawat, trolley, towing bar dan Forklif
- 4) Belum tersedianya kendaraan patroli, Mobil kawal, metal detector dan dukungan crew.
- 5) Perumahan dinas belum mampu menampung seluruh personel. Dari rumdis yang ada, kondisinya perlu perbaikan atau penambahan unit.
- 6) Perlu ada pembangunan mess untuk wara dan perwira
- 7) Kondisi ambulance yang ada kurang memadai sehingga perlu pengadaan baru.

d. Rumah Sakit TNI Banjarmasin

Selain menerima paparan dari tiga satuan TNI tersebut diatas, Tim Kunker Komisi I DPR RI juga melakukan kunjungan ke Rumah Sakit TNI Banjarmasin. Rumah sakit ini berada di bawah jajaran Korem 101/ANT dan digolongkan sebagai rumah sakit kelas III. Berikut adalah hasil temuan Komisi I DPR RI:

- 1) Rumah sakit TNI Banjarmasin merupakan rumah sakit milik TNI yang selalu dijadikan posko pada saat terjadi insiden atau bencana alam.
- 2) Rumah Sakit TNI ini tidak hanya menerima pasien TNI, tetapi juga dari masyarakat umum. Mekanisme penerimaan dan pelayanan pasien umum di rumah sakit mengikuti standar pelayanan kesehatan yang ada, seperti menerima akseptor askes atau jamkesmas. Namun demikian, rumah sakit ini tidak mendapatkan bantuan atau dukungan dari dinas atau Kementerian Kesehatan. Masyarakat sebaliknya lebih senang dilayani oleh rumah sakit ini karena sistem dan mekanisme penerimaan pasien peserta askes atau jamkesmas jauh lebih cepat.
- 3) Berdasarkan undang-undang kesehatan yang ada, segala alat kelengkapan, fasilitas atau sarana prasana rumah sakit harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Namun demikian rumah sakit ini belum mampu memenuhi standar tersebut karena belum ada dukungan anggaran dari pusat.

- 4) Rumah sakit ini hanya didukung oleh 2 unit kendaraan ambulance tahun 1998 dengan kondisi di bawah standar. Apabila ada VVIP, maka diupayakan meminjam ambulance Angkatan Udara. Persoalannya, ambulance milik AU itu sendiri sedang rusak.

2. BIDANG KOMINFO

Dibidang Kominfo, Komisi I DPR RI menerima paparan dari beberapa unsur Kominfo, yaitu RRI, TVRI, Loka Monitor, PT. Pos dan KPID. Berikut adalah beberapa persoalan yang dihadapi unsur Kominfo di Kalimantan Selatan:

a. TVRI Provinsi Kalimantan Selatan

Beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) Gedung yang ditempati TVRI merupakan gedung milik Pemda dengan status pinjam.
- 2) Kendaraan liputan yang tersedia hanya 2 unit dengan kondisi kurang layak untuk perjalanan luar kota
- 3) Personel petugas liputan jumlahnya terbatas
- 4) Untuk melayani berbagai jenis liputan baik liputan berita harian maupun produksi paket dan feature, TVRI Kalimantan Selatan hanya didukung oleh 7 unit kamera. 2 unit kamera lainnya dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan sama sekali
- 5) Peralatan teknik sebagian rusak dan kapasitasnya menurun yang berakibat jangkauan siaran menjadi terbatas. Hal ini diakibatkan usia peralatan yang sudah tua, terbatasnya pengadaan suku cadang dalam beberapa tahun terakhir dan tidak adanya pengadaan peralatan baru dalam beberapa tahun terakhir.
- 6) Minimnya dukungan anggaran operasional dan anggaran untuk perbaikan teknik.

Hambatan tersebut berdampak pada kinerja liputan buletin yang kurang optimal, akses crew liputan menjadi sangat terbatas dan akibatnya materi liputan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar serta beberapa Kabupaten terdekat.

b. RRI Provinsi Kalimantan Selatan

Beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) Prasarana yang dimiliki cukup memadai, namun perlu dipikirkan untuk dilakukan segera regenerasi dalam rangka menjawab tantangan dan perubahan kemajuan teknologi, seperti komputer dan jaringan internet dan masih minimnya/belum standar peralatan yang digunakan untuk operasional pada acara-acara dialog interaktif/talk show.

- 2) Dari segi kualitas SDM yang ada masih perlu ditingkatkan kemampuannya, terbatasnya tenaga-tenaga yang kreatif di bidang penyiaran, khususnya sebagai penyiar serta tingkat kemampuan SDM yang masih belum merata, baik ditinjau dari pendidikan formal maupun non formal.
- 3) Sudah 11 tahun tidak ada penerimaan CPNS di lingkungan RRI, sementara dari jumlah PNS yang ada, jumlahnya akan habis pada tahun 2016.

c. KPID dan PRSSNI Provinsi Kalimantan Selatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPID Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat inkonsistensi penyelenggaraan Undang-Undang dengan pelaksanaan proses perizinan, belum adanya kepastian hukum di bidang perijinan, dimana terdapat dualisme dalam pemberian ijin siaran di daerah. Hal ini berdampak terhadap keberadaan para penyelenggara siaran
- 2) Masih banyak lembaga penyiaran yang belum berizin namun tetap beroperasi, termasuk lembaga penyiaran publik lokal yang berada di bawah naungan Pemda. Hal ini terjadi akibat adanya dualisme dalam pemberian perijinan di Provinsi Kalsel, yaitu adanya peraturan dari Depkominfo dimana Infokom daerah dapat pula memberikan perijinan. Hal ini dirasakan sangat bertentangan dengan amanat UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3) Mekanisme perizinan dinilai sangat lamban karena terkonsentrasi di pusat.
- 4) Peran dan wewenang KPID masih lemah sehingga perlu diperkuat melalui revisi UU no 32 Tahun 2002
- 5) sarana dan prasarana serta anggaran operasional masih dipinjamkan melalui Pemda dan dinas Infokom di daerah

d. PT. POS IX Kalimantan

Wilayah usaha Pos IX Kalimantan meliputi 4 provinsi, yang salah satunya adalah Provinsi Kalsel yang mempunyai 5 kantor pos pemeriksa untuk melayani 13 kodya/kabupaten. Fasilitas fisik pelayanan meliputi kantor pos pemeriksa, kantor pos cabang, pos keliling kota/desa, posarling, kantor pos desa, agen pos, warposkesra dan pos sekolah. Dalam menjalankan kegiatannya Kantor Pos IX Kalimantan menghadapi permasalahan, yaitu beban operasional, sumber daya manusia dan pemeliharaan kantor pos di wilayah/daerah-daerah terpencil.

e. Loka Monitor

Beberapa hal yang menjadi kendala Loka Monitor Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah:

- 1) Jumlah sumber daya manusia (operator/Teknisi dan PPNS) belum memadai

- 2) Belum terbitnya SKEP dan KTA PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga menyulitkan mereka dalam melakukan tindakan di lapangan (PP 58 Tahun 2010)
- 3) Luasnya wilayah monitoring dengan beberapa wilayah di Kabupaten Kotabaru yang belum terjangkau oleh transportasi darat seperti Pulau Seubku, Pulau Sembilan, Kecamatan Senakiin dan Kecamatan Tanjung Soka.

BAB III

KESIMPULAN, SARAN-REKOMENDASI, DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan maupun tinjauan langsung yang dilakukan oleh tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI terhadap kesiapan sumber daya manusia serta sarana maupun prasarana yang ada pada beberapa mitra kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi I DPR RI menyimpulkan bahwa sebagian besar kondisinya masih jauh dari kondisi ideal. Untuk itu, perlu adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan pada sektor peningkatan SDM, pemenuhan logistik/perengkapan/sarana/prasana, serta peningkatan kesejahteraan.

Pada saat ini, bidang pertahanan diprioritaskan pada peningkatan alutsista dengan dukungan anggaran yang sangat besar, tetapi mengabaikan persoalan kesejahteraan dan dukungan logistik bagi para personel dan keluarganya seperti dukungan perumahan atau kendaraan dinas. Teknologi (alutsista) yang baik tanpa didukung oleh manusia (prajurit TNI) yang sejahtera sebagai operator atau user di lapangan tidak akan menghasilkan produk atau tujuan seperti yang diharapkan: *not the gun behind the man but the man behind the gun*. Karena itu, selain adanya prioritas terhadap peningkatan alutsista, juga perlu diperhatikan kesejahteraan bagi para prajurit dan keluarganya.

Berdasarkan data yang ada, terakhir kali Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah pada tahun 2006. Dari laporan yang ada dan tinjauan ke lokasi, dapat disimpulkan bahwa dari tahun tersebut, persoalan yang terjadi pada mitra-mitra Komisi I DPR RI di Kalimantan Selatan tidak berubah dan tidak ada kemajuan, bahkan semakin buruk. Hal ini melahirkan asumsi sebagai berikut:

1. Berbagai rekomendasi Komisi I DPR RI sebelumnya tidak diindahkan oleh pemerintah pusat
2. Pemerintah pusat terlalu fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas dan besar, tetapi abai terhadap persoalan teknis operasional dan faktual di lapangan
3. Kunjungan Komisi I DPR RI ke beberapa wilayah dinilai tidak ada hasil atau manfaat konkrit oleh para mitra daerah

Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI berinisiatif agar pada kunjungan kerja berikutnya, setiap tim dibekali dana dari pemerintah untuk mitra-mitra terkait, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan seperti bantuan tunai untuk renovasi rumah dinas, pemenuhan sarana/prasarana kesehatan dan lain sebagainya. Dana tersebut diambil dari APBN pemerintah yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR RI.

B. SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT

Terkait dengan laporan dan hasil temuan tersebut di atas, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan saran kepada pemerintah pusat untuk segera memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan para pelaksana tugas mitra Komisi I di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI menyampaikan berbagai rekomendasi sebagai berikut:

1. PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI DAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Komisi I DPR RI memaklumi ketidakhadiran pihak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kunjungan kerja ini, namun seharusnya tetap memberikan perhatian besar melalui protokoler pemerintahan seperti yang telah ditetapkan. Akibat dari tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak protokoler dan mitra kerja Komisi I DPR RI di Kalimantan Selatan, banyak agenda acara yang mekanisme dan pengelolaannya tidak sesuai aturan yang ada.

2. BIDANG PERTAHANAN

- a. Kondisi kesejahteraan prajurit, khususnya rumah dinas tidak mengalami perubahan sejak terakhir kali Komisi I DPR RI melakukan kunjungan ke satuan ini pada tahun 2006. Rumah dinas yang kini ditempati direnovasi dengan dana swadaya dan tanpa ada bantuan dari pusat. Sebagian rumah dinas yang ada tidak lagi layak untuk ditempati dan perlu segera untuk dibangun rusunawa atau rusunami.
- b. Pemerintah segera memenuhi jumlah personel di berbagai satuan yang kurang memenuhi TOP/DSSP
- c. Untuk pelayanan rumah sakit TNI, agar ada bantuan anggaran dari Kementerian Kesehatan karena rumah sakit tersebut juga melayani pasien umum dan kerap menjadi posko utama apabila terjadi indisen atau bencana alam.

3. BIDANG KOMINFO

- a. Mitra dibidang Kominfo agar meningkatkan pelayanannya di masyarakat menjadi semakin baik. Sebagai lembaga publik, maka pengutamakan harus ditekankan pada faktor pelayanan publik secara prima bukan pada aksi profit taking.
- b. Perlu ada komuniaksi lebih intensif baik antara pelaku kominfo di daerah maupun dengan pihak pemerintah daerah

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012. Kami harapkan hasil kunjungan kerja

tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.

Jakarta, 21 November 2011

TIM KUNKER KOMISI I DPR RI KE
KALIMANTAN SELATAN
KETUA,

TUBAGUS HASANUDDIN
A-350